

# **LAPORAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA TAHUN 2020**



**BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disajikan gambaran secara obyektif informasi penerapan indikator dalam angka sebagai bentuk pencapaian kinerja di Bagian Administrasi Kerja Sama. Kebenaran data dan angka diolah menjadi bahan evaluasi yang secara terus menerus dikaji agar diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung oleh sistem yang memadai. Hal ini sangat diperlukan sebagai kejelasan dari sasaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menjabarkan sesuatu yang akan dicapai saat ini maupun periode yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih ada kekurangannya dan besar harapan kami adanya masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA**



**MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE., MAP.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690913 199603 1 005

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Gambaran Umum .....	2
1. Organisasi Perangkat Daerah .....	3
2. Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	6
D. Sistematika .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	10
A. Perencanaan Strategis .....	10
1. Tujuan dan Sasaran .....	10
2. Kebijakan dan Program .....	11
B. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
1. Capaian Kinerja .....	14
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	14
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 ..	14
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	14
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi .....	15
3.. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	17
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	17
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.....	17
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	17
B. Realisasi Anggaran .....	17
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	19
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Perubahan Rencana Strategis (2016-2021)	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
4. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020	
5. Perhitungan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020	
6. Rekapitulasi Dokumen Kerja Sama Tahun 2020	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Kerja Sama tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori capaian sasaran berhasil sebanyak 1 (satu) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Bab XVII Pasal 363 ayat 1 telah memberikan jalan keluar yaitu *Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan*, yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang membentuk bagian yang khusus menangani permasalahan pelaksanaan kerjasama dengan harapan pelaksanaan kerjasama dapat lebih dikembangkan dan berdampak pada peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ada Bagian Administrasi Kerja Sama berusaha melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan semaksimal mungkin guna peningkatan kinerja di Pemerintahan Kabupaten Malang.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan

hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan:

1. Tolak Ukur bagi pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Administrasi Kerja Sama yang sasarannya adalah peningkatan kerja sama diberbagai bidang dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif dan saling menguntungkan.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya.

Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya mempunyai keterbatasan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan jalan keluar yaitu daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan atau pihak ketiga. Guna memudahkan daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain ataupun dengan pihak ketiga, diperlukan lembaga teknis yang menangani kegiatan kerja sama tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah maka dibentuk Bagian Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Kerjasama Setda juga mengalami perubahan diantaranya:

1. pengurangan urusan yang ditangani (urusan kerja sama antar desa);
2. perubahan nomenklatur Bagian dan Sub Bagian (Bagian Kerjasama mengalami perubahan menjadi Bagian Administrasi Kerja Sama);

## **1. Organisasi Perangkat Daerah**

1) Tugas pokok Bagian Administrasi Kerja Sama:

- a. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Administrasi Kerja Sama mempunyai fungsi :

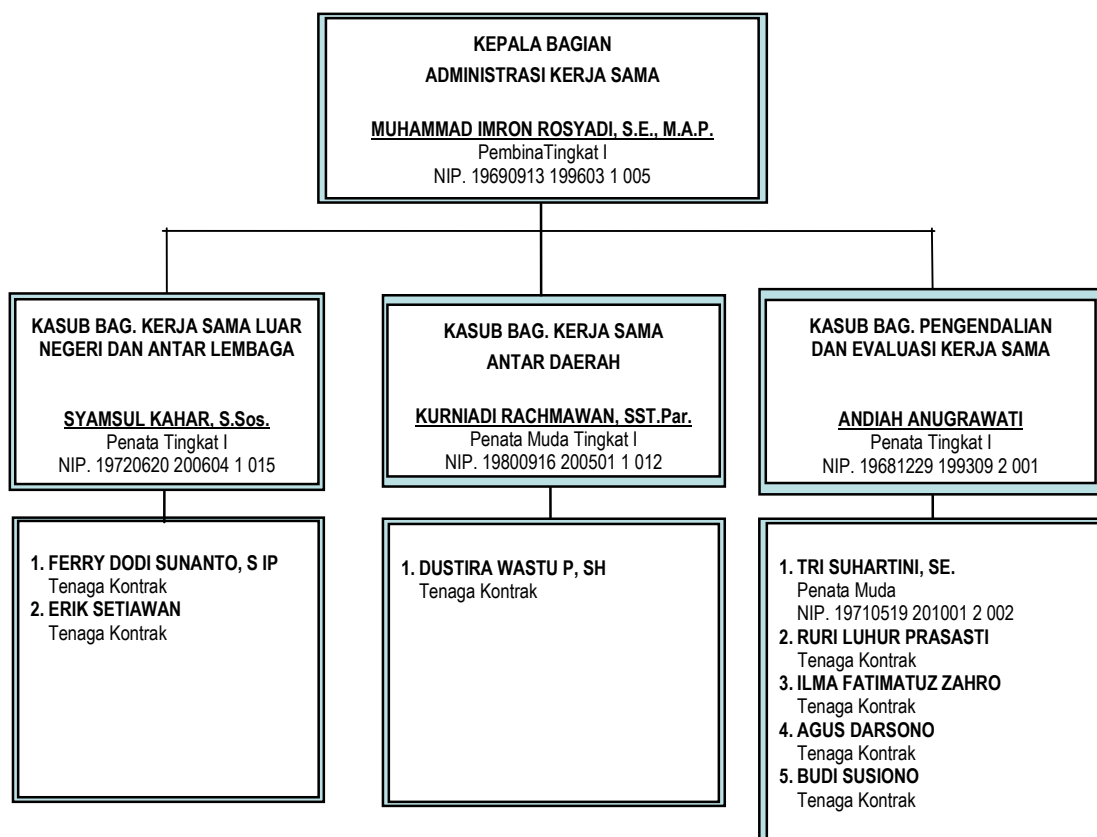
- a. penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan data kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kerja sama daerah;
- f. penyiapan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kerjasama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya.



- 3) Adapun Perangkat Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama antara lain:
- (1) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga mempunyai tugas:
    - a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga untuk acuan pelaksanaan tugas;
    - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama Luar Negeri dan Antar Lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan pihak luar negeri, dalam rangka pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerjasama antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - e. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerjasama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - f. menyiapkan data monitoring, evaluasi kerjasama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (2) Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugas:
    - a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama antar Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;
    - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - d. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
    - e. menyiapkan data monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;

- f. merumuskan kebijakan penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerja sama antar daerah;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan pengkajian terhadap usulan-usulan kerja sama daerah;
  - c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil kerjasama daerah;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah;
  - e. menyusun dan menganalisa laporan hasil evaluasi kerjasama daerah;
  - f. melaksanakan inventarisasi, sistematika serta pengolahan data kerjasama daerah;
  - g. menyelenggarakan sosialisasi sehubungan dengan peraturan/ kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama daerah
  - h. melaksanakan Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Administrasi Kerja Sama;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.

### STRUKTUR ORGANISASI



Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Administrasi Kerja Sama sampai dengan akhir tahun 2020 didukung sebanyak 12 orang pegawai dengan kriteria jenis kelamin, kepangkatan dan pendidikan sebagaimana tabel berikut:

*a. Berdasarkan Jenis Kelamin*

No.	Sub Bagian	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
	Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama	1 orang		1 Orang
1.	Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga	3 orang	-	3 Orang
2.	Kerja Sama Antar Daerah	2 orang	-	2 Orang
3.	Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama	2 orang	4 orang	6 Orang
	<b>J U M L A H</b>	<b>6 orang</b>	<b>4 orang</b>	<b>12 Orang</b>

*b. Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan*

No	ESELON	GOL / RUANG					STRATA PENDIDIKAN			
		IV	III	II	I	Non gol	SLTA	SARMUD	S-1	S-2
1	III	1								1
2	IV	1	2						2	1
3	STAF		1						1	
4	HONORER					7	5		2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>7</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>2</b>

*a. Berdasarkan Diklat Kepemimpinan*

No	ESELON	DIKLAT KEPEMIMPINAN		
		Diklat Pim IV	Diklat Pim III	Diklat Pim II
1	III	1	1	
2	IV	1		
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

**2. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah / Luar Negeri / Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah / Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	81%

Pada data yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa persentase Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama dengan target 80% dan realisasi 81%, sehingga dapat dikatakan target tercapai, dengan capaian 101% sehingga dapat dikatakan berhasil. Realisasi 81% merupakan hasil dari perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mana akan kami sampaikan perhitungannya dalam ***lampiran*** Laporan Kinerja ini. Jika dilihat tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Keberhasilan dalam memenuhi target indikator kinerja yang telah dicanangkan dalam peningkatan realisasinya dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Perangkat Daerah sudah lebih memahami tata cara pelaksanaan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam rangka meminimalisir kemungkinan kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Kerja Sama telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas pokok dan fungsi bagian kerjasama dapat dilaksanakan secara maksimal.
- c. Mempelajari perubahan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sebagai bahan analisa pelaksanaan kerja sama.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Kerjasama Pembangunan. Hal tersebut dikarenakan program tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan jumlah kerja sama.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dalam mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja adalah :

Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah.
2. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Maksud dari program kegiatan di atas adalah untuk menjalin pelaksanaan kerja sama dengan :

- ❖ Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- ❖ Daerah lain baik dari dalam atau diluar provinsi Provinsi Jawa Timur;
- ❖ Badan Usaha/lembaga dari dalam dan Luar Negeri, baik dari pihak Swasta maupun Pemerintah;
- ❖ Negara lain dalam bentuk sisters city dan/atau G to G.

Yang tujuan peningkatan pembangunan di semua bidang sesuai kewenangan otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada program tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat dari pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang, baik dengan daerah lain, badan usaha/lembaga sehingga kerjasama yang dilaksanakan berdampak positif dan kedepan hasil monitoring dan evaluasi program tersebut sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja peningkatan kuantitas kerjasama antar daerah/luar negeri/lembaga.

Dengan demikian secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kab. Malang, utamanya program prioritas/utama sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian penetapan kinerja tahun 2019.

#### **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

##### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2019
- D. Sistematika

##### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

##### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Bagian Kerjasama
  - 1. Capaian Kinerja Organisasi

- 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
  - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019
  - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
  2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi
  3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
    - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran

## **BAB IV : PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Lampiran I   | Matriks Renstra Tahun 2016-2021 |
| Lampiran II  | Perjanjian Kinerja Tahun 2020   |
| Lampiran III | Rencana Kinerja Tahun 2020      |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja Tahun 2020   |

## A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen rencana strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen rencana strategis memuat pernyataan tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen rencana strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan rencana strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

### 1. Tujuan Dan Sasaran

Bagian Administrasi Kerja Sama merupakan organisasi unsur dari sekretariat yang fungsinya adalah sebagai staf pendukung (*Supporting Staff*). Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Administrasi Kerja Sama adalah merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 6 tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan urusan Bagian Administrasi Kerja Sama adalah Tujuan 1 (Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat), Sasaran 3 (Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik) dari Misi 02 (Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi).

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tujuan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Mewujudkan kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga.

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kerja sama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga.

## **2. Kebijakan Dan Program**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, sasaran dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Misi, Sasaran dan Tujuan tersebut, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang kerja sama Kabupaten Malang selama enam tahun kedepan (2016-2021). Maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang telah menetapkan strategi, sebagai berikut :

1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan kerja sama dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dan telah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama senantiasa mengutamakan partisipasi stakeholder, karena pada prinsipnya setiap stakeholder mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
- c. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam dan luar negeri.



- d. Membangun transparansi dalam setiap penyusunan naskah kerja sama, sehingga dapat diakses oleh setiap pihak yang membutuhkan.
- e. Membangun jaringan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama.
- f. Membangun sumber daya aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang yang mempunyai visi strategis (strategic vision) sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.
- g. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan good governance.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Bagian Administrasi Kerja Sama Setda melaksanakan 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

I. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Fasilitasi Dan Peningkatan Kerja Sama Daerah;

II. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
8. Penyediaan Makanan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
15. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah;
16. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri;
17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

## B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 %

Perjanjian Kinerja tersebut didukung Program dengan anggaran :

	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 480.365.187,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 96.180.000,-
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 0,-
4.	Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Rp. 395.208.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 971.753.187,-</b>

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Capaian Kinerja

#### 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	84%	105%

Perhitungan Realisasi merupakan hasil dari perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mana akan kami sampaikan perhitungannya dalam *lampiran* Laporan Kinerja ini.

#### 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Gambaran Perbandingan antara Target Kinerja serta Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI (%)	
		2019	2020	2019	2020
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	80%	88%	84%

#### 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Dengan Indikator Kinerja yang demikian Bagian Administrasi Kerja Sama membuat Target Capaian setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam satuan jumlah dokumen kerja sama (terlampir), sehingga didapat jumlah dokumen kerja sama pada akhir periode RPJMD (2016-2021) sebanyak 348 dokumen

Pada tahun 2020 ini Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten telah dapat melaksanakan targetnya dengan baik. Hal ini dapat

diketahui dari rata-rata capaian kinerja program dari indikator yang telah ditetapkan semuanya telah tercapai 73,75%.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri/Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	81%	84%	82%

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pada data yang telah dijelaskan diatas diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang terpenuhi dan tercapai 84%. Jika dilihat dari tahun 2020 menunjukkan adanya fluktuasi peningkatan. Keberhasilan dalam memenuhi target indikator kinerja yang telah dicanangkan dalam peningkatan realisasinya dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. terselenggaranya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Perangkat Daerah sudah lebih memahami tata cara pelaksanaan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Kerja Sama telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi, lembaga baik di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tugas pokok dan fungsi bagian kerjasama dapat dilaksanakan secara maksimal.
- c. Mempelajari perubahan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sebagai bahan analisa pelaksanaan kerja sama.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian

kinerja organisasi adalah Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah. Hal tersebut dikarenakan program tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan jumlah kerja sama.

Program yang menunjang Keberhasilan pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang dalam mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja adalah Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah;
2. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Maksud dari kegiatan di atas adalah untuk menjalin pelaksanaan kerja sama dengan :

- ❖ Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- ❖ Daerah lain baik dari dalam atau diluar provinsi Provinsi Jawa Timur;
- ❖ Badan Usaha/lembaga dari dalam dan Luar Negeri, baik dari pihak Swasta maupun Pemerintah;
- ❖ Negara lain dalam bentuk sisters city dan/atau G to G.

Yang tujuan peningkatan pembangunan di semua bidang sesuai kewenangan otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

Sedangkan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada program tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat dari pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang, baik dengan daerah lain, badan usaha/lembaga sehingga kerja sama yang dilaksanakan berdampak positif dan kedepan hasil monitoring dan evaluasi program tersebut sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja peningkatan kuantitas kerja sama antar daerah/luar negeri/lembaga.

Dengan demikian secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kab Malang, utamanya program prioritas/utama sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian penetapan kinerja tahun 2020.

### 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	Rp. 395.208.000,-	40,67%

#### 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.6  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	84%	105%	395.208.000	394.361.053	99,79%

#### 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Tabel 3.7  
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	105%	99,79%	0.05%

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan alokasi anggaran atau belanja yang diperoleh Bagian Kerjasama dibandingkan dengan realisasinya.

Alokasi Anggaran Belanja pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Tahun 2020 sebesar Rp971.753.187,- dari alokasi tersebut telah

terrealisasi sebesar Rp967.783.694,- atau 99%, dan sisa anggaran sebesar Rp3.969.493,- atau 0,31%.

Secara rinci realisasi keuangan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang pada Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.8  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
<b>BELANJA :</b>	971.753.187,-	967.783.694,-	3.969.493,-	99,7
<b>Belanja Langsung dengan Program :</b>	971.753.187,-	967.783.694,-	3.969.493,-	99,7
1. Administrasi Perkantoran	480.365.187,-	477.494.041,-	2.871.146,-	99,4
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96.180.000,-	95.928.600,-	251.400,-	99,7
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,-	0,-	0,-	0
4. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	395.208.000,-	394.361.053,-	846.947,-	99,7

## **A. TINJAUAN UMUM**

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala program dan kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Sebagaimana dalam penerapan sistem yang baru, dalam penyusunan LKj ini masih membutuhkan persiapan sumberdaya yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga sangatlah wajar apabila LKj yang disusun oleh Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang ini masih jauh dari kesempurnaan dan lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran daripada bentuk pemenuhan penilaian tampilan kinerja organisasi. Oleh karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk saran dan kritik untuk perbaikannya.

## **B. TINJAUAN KHUSUS**

Berangkat dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang dimiliki, obyektifitas informasi penetapan indikator dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang diperoleh kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Malang.

Informasi yang disusun dalam bentuk LKj ini sangatlah bergantung pada sistem dan aturan-aturan yang ada serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun bersama. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja wajib secara terus-menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga LKj yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu dihasilkan guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi disekitar organisasi.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matriks Perubahan Renstra Tahun 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
5. Perhitungan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020
6. Rekapitulasi Dokumen Kerja Sama Tahun 2020

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA  
TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan kerjasama antar daerah, luar negeri dan lembaga	Terwujudnya kerja sama antar daerah dalam negeri, antar daerah luar negeri dan lembaga	Persentase Peningkatan Kuantitas dan kualitas Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri/ Lembaga	Jumlah KB dan PKS tahun n dikurangi Jumlah KB dan PKS tahun n-1 dibagi Jumlah KB dan PKS tahun n-1 dikali 100%	100% (45 dokumen kerja sama/ 5% peningkatan)	100% (47 dokumen kerja sama/ 5% peningkatan)				
	Terwujudnya Pelaksanaan Kerjasama di Kabupaten Malang yang Efektif dan Saling Menguntungkan di Semua Bidang Kerja Sama	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	Jumlah Naskah Kerja Sama dibagi Jumlah Fasilitasi Kerja Sama dikali 100 %			80% (50 dokumen kerja sama)	80% (52 dokumen kerja sama)	80% (55 dokumen kerja sama)	80% (57 dokumen kerja sama)



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen ☎ (0341) 392024  
email: [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id) Website: <http://malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE**  
Jabatan : **Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Malang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2020

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama,**

  
**Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660504 198811 1 001

  
**MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690913 199603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 491.086.500,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 60.296.500,-	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 6.870.000,-	APBD
4. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Rp. 516.034.000,-	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 1.074.287.000,-</b>	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama) siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, Januari 2020

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA**

  
**MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690913 199603 1 005

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600504 198811 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen ☎ (0341) 392024  
email: [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id) Website: <http://malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE., M.A.P.**  
Jabatan : **Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama**

Selanjutnya disebut pihak pertama

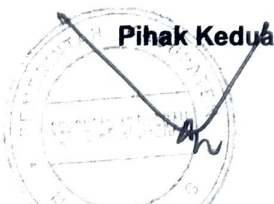
Nama : **Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Malang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, November 2020

**Pihak Kedua**  


**Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661217 199303 1 006

**Pihak Pertama,**



**MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE., M.A.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690913 199603 1 005


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 480.365.187,-	APBDP
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 96.180.000,-	APBDP
3. Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Rp. 395.208.000,-	APBDP
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 971.753.187,-</b>	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama) siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

**SEKRETARIS DAERAH**



**Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661217 199303 1 006

Kepanjen, November 2020

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA**



**MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE., M.A.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690913 199603 1 005

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Kerja Sama Setda  
Tahun : 2020

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terwujudnya kerja sama antar daerah/ luar negeri/ lembaga di Kabupaten Malang yang efektif dan saling menguntungkan disemua bidang	Persentase kerja sama antar daerah / luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama.	80 %

Malang, Januari 2021

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SETDA KABUPATEN MALANG**



**MUHAMMAD IMRON ROSYADI,SE.,MAP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690913 199603 1 005

## PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : Malang  
Nama Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Kerja Sama Setda

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Terwujudnya kerja sama antar daerah/ luar negeri/ lembaga di Kabupaten Malang yang efektif dan saling menguntungkan disemua bidang	Persentase kerja sama antar daerah/ luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama	80 %	84%	104%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 971.753.187,-  
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 967.783.694,-

Malang, Januari 2021

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SETDA KABUPATEN MALANG**



**MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE., MAP.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690913 199603 1 005



**Perhitungan Capaian Kinerja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2020****Indikator Kinerja Utama Bagian Kerjasama**

Persentase kerja sama antar daerah/luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama

=

 $\Sigma$  Naskah Kerja Sama $\Sigma$  Fasilitasi Kerja Sama**Capaian Kinerja**

84%

 $\frac{63}{75}$

**DATA PERMOHONAN FASILITASI KERJA SAMA  
TAHUN 2020**

NO	NO. SURAT	NO. AGENDA	AD/AL	DARI	PERIHAL	KET
			AD	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas penandatangan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang penyehatan lingkungan permukiman (PLP) Tahun Anggaran 2020	
1	660/0335/35.07.117/2020	47	AD	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas penandatangan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang penyehatan lingkungan permukiman (PLP) Tahun Anggaran 2020	
2	120.23/41/033.4/2020	71	AD	sekda prov.jatim	Kerja Sama antar Daerah	
3	005/477/213.2/2020	77	AD	Bakorwil	Undangan, persiapan penandatangan MoU oleh Kepala Daerah Malang Raya.Selasa,11 Feb 2020 di bakorwil	
4	92/DSTIA/Q/2020	78	AL	STIA MALANG	Perjanjian Kerjasama	
5	0230/DHW/RI/20/2020	98	AL	PT MAHA SARUNA	Investasi PLTS	
6	HK.03/01/2.8/06.22/2020	89	AL	Poltekkes Kemenkes	Permohonan Perjanjian Kerjasama	
7	017/STIA-BD/II/2020	111	AL	STIA BANDUNG	masyarakat	
8	0032/MACHUNG/REKTOR/II/2020	118	AL	rektor univ.ma chung	permohonan perpanjangan kerja sama	
9	24.2.38/UN32-IV/TU/2020	128	AL	Univ. Negeri Malang (UM)	Permohonan pembaharuan MoU Pemkab Malang	
10	937/303/35.07.205/2020	109	AD	Bapenda	Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bapenda kab.malang tentang pengintegrasian data pertanian dengan pbb	
11	307/CCG/Prop/MT/0220		AL	Cognascant Consulting Group	Penawaran Kerjasama	
12	B-964/un.03/01.01.5/03/2020	144	AL	univ.islam negeri maulana malik Ibrahim	Permohonan perpanjangan MoU	
13	950/485/35.07.204/2020	154	AL	bidad	Permohonan fasilitas	
14	690/870/35.07.302/2020	166	AL	perumda tirta kaniuruhan kab.malang	permohonan fasilitas rencana kerjasama	
15	556/401/35.07.108/2020	170	AL	dinas pariwisata dan kebudayaan	permohonan fasilitas	
		165	AL	dinas perikanan		
16	900/550/35.07.115/2020				Draft Perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan pelelangan ikan di tpi pondokadap pada dinas perikanan kab.malang	
17	440/1191/35.07.103/2020	186	AL	dinas kesehatan	permohonan fasilitas addendum pks tahun 2016 tentang kesepetaan ijin-kin	
18	145/0111U.AK/R/1./15/II/2020	189	AL	Unisma	Undangan, penyusunan draft surat perjanjian kerjasama pemanfaatan BPP se kab.malang sebagai laboratorium kegiatan praktik kerja lapang & penelitian dosen dan mahasiswa fakultas pertanian unisma	
19	134.4/249/35.07.111/2020	195	AD	DPPKPTR	Hasil koreksi draft pks tentang kerjasama penyusunan RT RW dalam wilayah perbatasan administrasi pemerintahan	
20	005/3055/35.07.032/2020	217	AL	BAGIAN TU	undangan, rakor rencana kerjasama taman wisata wendit 20 april 2020 pkl.07.30 di RR.Sekda (Malang)	
21	725/Pejualan/Rite/0420	212	AL	pos indonesia	proposal kerjasama distribusi bantuan tunai dan natura dampak covid-19 kab.malang melalui pos indonesia	
22	S-139/PK/2020	213	AD	Dirjen pengembangan keuangan kement keu RI	perluasan perjanjian kerjasama antara DIP.DJKP dan pemda th.2020	
23	973/886/35.07.205/2020	242	AL	bapenda	draft pks dgn pt.pos indonesia kantor pos malang tentang penerimaan pembayaran pbb perdesaan dan perkotaan	
24	82/5.WCH/800.03.VI/2020	243	AL	stikes widya cipta husada	permohonan pengajuan pembahasan kesepakatan bersama	
25	520/956/35.07.114/2020	244	AL	dinas tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan	perjanjian kerjasama dengan dekan fakultas pertanian universitas islam malang	
26	W15.LUM.01.01-42	262	AD	kementerian hukum dan HAM RI karwil jatim	perjanjian kerjasama (pks)dalam rangka peningkatan perlindungan KI	
27	891/5/MG.18/BSJU/2020	265	AL	bank bin	penawaran dan permohonan kerjasama	
28	B/22165/UN38.W/KS.03/2020	266	AL	wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama (unesa)	permohonan kerjasama	
		271	AL	bidad		
29	950/966/35.07.204/2020				perpanjangan perjanjian kerja sama antara bikad kab.malang dgn PT.Bank pembangunan daerah jatim tbk cabang (kepanjen)	
30	364/SPKS/PMU/N/20	295	AL	pajar mulya utama_solo	Penawaran Kerjasama	
31	012/950/35.07.204/2020	290	AL	bidad	penyampaian perjanjian sewa barang milik Pemkab malang	
32	440/2353/35.07.103/2020	296/292	AL	dinas	permohonan fasilitas addendum ke-4 pks Pemkab malang dgn bpps kesehatan	
33	S.384/KSDAE/PWA/NSA.016/2020	299	AD	Dirjen KSDAE Kementerian LHK	peretujuan KS pemanfaatan dan pengembangan jalan eksisting di zona khusus TNBTS Kab.Malang prov.jatim an. Pemkab	
34	074.2/2011/35.07.107/2020	302	AL	dispendukcapil	permohonan fasilitas kerja sama	
35	W13-A35/4119/HK.05.VI/2020	328	AD	pengadilan agama kab.malang	permohonan fasilitas kerja sama	
36	003671/DMC.VI/2020				penawaran kerjasama pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan	
37	/IT3/TU/2020	350	AL	Institut pertanian bogor	pembaharuan nota kesepahaman bersama (MoU)	
38	950/1558/35.07.204/2020	384	AL	bidad	permohonan fasilitas mengundang dan mempinng rapat	
39	660/575/35.07.111/2020	410	AD	dinas perumahan,kawasan permukiman & cipta karya	fasilitasi kerjasama dengan pemerintah desa ngadilanguk kec.kepanjen	
		407	AL	Bagian. TU		
40	005/5840/35.07.032/2020				undangan pembaharuan pks antara bikad dgn PT.BTM persero cabang malang tentang layanan perbankan penempatan deposito	
41	6222/UN10.A04/KS/2020	404	AL	Univ.Brawijaya	permohonan pembaharuan Kesepakatan Bersama	
42	005/3042/35.07.117/2020	401	AL	Dinas LH	undangan Rapat koordinasi bersama perwakilan PT Systemic Lestari Indonesia	
43	B-1043/LUM/IX/2020	429	AL	Unmer Malang	permohonan perpanjangan kesepakatan bersama	
44	074.2/3067/35.07.107/2020	431	AD	Dispendukcapil	permohonan fasilitas kerja sama	
45	0633/86/01kes-4PI/IX/2020	442	AL	Stikes Keparjayan	perpanjangan kesepakatan bersama	
46	W15.LUM.01.01-2632	440	AD	Kementri hah.ham RI karwil jatim	Penandatangan Memorandum of understanding (MoU)	
47	556/206/35.07.401/2020	446	AL	Perumda jasa yasa	Permohonan persetujuan kerja sama pengelolaan hotel dan pemandian air panas alam songgort	

NO	NO. SURAT	NO. AGENDA	AD/AL	DARI	PERIHAL	KET
48	539/123/35.07.021/2020	495	AL	Bagian Administrasi Perekonomian	Persero Tbk	
49	193/14247/033.4/2020	496	AL	Setda Prov.Jatim	Dukungan kerja sama teknis pengendalian banjir pesisir dan revitalisasi sungai	
50	560/3516/35.07.105/2020	498	AL	Dinas Tenaga Kerja	Pemohonan fasilitasi kerja sama	
51	1048/UN10.F40/TU/2020	502	AL	Univ.Brawijaya	Penawaran kerja sama	
52	973/1905/35.07.205/2020	523	AL	Bapenda	Pengajuan draf pks antara Pemkab Malang dengan PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang	
53	119/2454/35.07.208/2020	544	AL	RSJUD Kanjuruhan Keparnten	Pemohonan fasilitasi kerjasama	
54	050/7000/35.07.202/2020	547	AL	BAPPEIDA	Pemohonan fasilitasi penandatanganan dokumen kesepakatan bersama	
55	119/2454/35.07.208/2020	557	AL	RSJUD Kanjuruhan Keparnten	Pemohonan fasilitasi kerjasama antara RSJUD Kanjuruhan Kab.Malang dengan PT.BNI (Persero) Tbk	
56	134/1497/35.07.124/2020	558	AD	Diskoninfo	Pemohonan fasilitasi draft nota kesepahaman	
57	143/601/MCI/XI/2020		AL	Mercy Corps	Proposal kerja sama Kab.Malang	
58	973/2176/35.07.205/2020	583 & 588	AL	Bapenda	Pemohonan fasilitasi perpanjangan perjanjian kerjasama	
59	B/BKS/77/XI/2020	614	AD	RS. Soepraoen	Perjanjian kerjasama pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat	
60	UBM/5.1/2953	624	AL	PT. BNI (Persero)	Perpanjangan nota kesepahaman BNI wilayah Malang Pemkab Malang	
61	440/5743/35.07.103/2020	628	AL	Dinas kesehatan	Pemohonan fasilitasi kerjasama	
62	973/2345/35.07.205/2020	629 & 647	AL	Bapenda	Pemohonan tidak ditindaklanjuti draft Perjanjian kerja sama dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brawijaya	
63	440/6141/35.07.103/2020	638	AL	Dinas kesehatan	Pemohonan fasilitasi pembahasan perpanjangan perjanjian kerja sama	
64	610/619/35.07.10/2020	637	AD	Kecamatan Gondanglegi	Pemohonan kerjasama pengelolaan aset antara pemerintah kabupaten dan desa	
65	EQUIC/MLG/2020/12/01	640	AL	EQUIC	Pemohonan kerjasama program organisasi penggerak (POP) Kementerian pendidikan dan kebudayaan	
66	440/6141/35.07.103/2020	645	AL	Dinas kesehatan	Pemohonan fasilitasi pembahasan perpanjangan perjanjian kerja sama	
67	50N/2020/10/2873	646	AL	Wawa Husada	Pemohonan perpanjangan perjanjian kerjasama	
68	074.2/4473/35.07.107/2020	656	AL	Dipendukcapil	Pemohonan untuk fasilitasi perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama	
69	973/2482/35.07.119/2020	657	AL	Bapenda	Draft Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	
70	1283/stikes/AUKER/XII/2020	660	AL	Stikes Maharani Malang	Pemohonan perpanjangan kesepakatan bersama antara Stikes Maharani dengan Dinas Kesehatan Kab.Malang	
71	440/6313/35.07.103/2020	661 & 6	AL	dinas kesehatan	Pemohonan fasilitasi perjanjian kerjasama antara Pemprov.Jatim,BPJS Kesehatan dengan Pemkab Malang	
72	973/2482/35.07.119/2020	3	AD	Ptt. Kepala Bapenda	Draft PKS tentang pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	
73	518/07/35.07.112/2021	7	AL	Dinas Koperasi dan usaha mikro	Penawaran kerjasama mercy corps indonesia	
74	04/0116/U.AK/R/C.05/1/2021	12	AL	Unisma	Pemohonan perpanjangan kerja sama	
75	07/111/STWDL/2021	13	AL	STIOSPOL "Waskita Dharma Malang"	Usulan perjanjian kerjasama	

## DAFTAR HIMPUNAN NASKAH KERJA SAMA TAHUN 2020

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Nomor: 120.23/ 10 / 033.4/KSB/2020 Nomor: 120.23/1/35.07.022/2020  Tanggal : 02 Januari 2020 - 02 Januari 2021	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	12 bulan Tanggal : 02 Januari 2020 - 02 Januari 2021		untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jatim	Nomor: 120.23/42/PKS/033.4/2020  Nomor:120.23/2/35.07.022/2020  Tanggal :0 2 Januari 2020 -02 Desember 2021	Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya tahun 2020	12 bulan Tanggal :0 2 Januari 2020 -02 Desember 2021		peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan mutu pelayanan kesehatan serta pendekatan jangkauan jangkauan pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan tingkat dasar
3	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II	Nomor:  Nomor:119/3/35.07.022/2020 Tanggal : 21 Januari 2020	Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan seleksi CPNS formasi Th 2019 dengan metode CAT Badan Kepegawaian Negara			menjamin akuntabilitas pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang
4	Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	Nomor:134.4/4/35.07.022/2020  Tanggal : 12 Februari 2020 - 31 Desember 2020  Nomor:470.2/UN10.F08/KS/2020 Tanggal : 12 Februari 2020 - 31 Desember 2020	Perjanjian kerjasama tentang tentang pendampingan program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Malang	10 bulan  Tanggal : 12 Februari 2020 - 31 Desember 2020		diperolehnya rencana implementasi intervensi spesifik dan sensitif yg konvergen dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Malang melalui pendampingan perguruan tinggi

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan Kantor Pertanahan Kab.Malang	Nomor :119/5/35.07.022/2020  Nomor :82/mov-35.07/11/2020  Tanggal :13 Februari 2020-13 Februari 2023	Perjanjian kerja sama tentang pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan	3 Tahun  Tanggal :13 Februari 2020-13 Februari 2023		percepatan pelayanan dan pemutakhiran data bagi PARA PIHAK
6	Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu	Nomor: 134.4/6/35.07.022/2020  Nomor: 415.4/5/35.73.111/2010  Nomor: 180/06/KB/422.021/2020 Tanggal :5 Maret 2020 - 5 Maret 2021	Kesepakatan Bersama tentang kerja sama Pembangunan Daerah di Malang Raya	12 bulan  Tanggal :5 Maret 2020 - 5 Maret 2021		mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
7	Indonesia china business council (ICBC)	Nomor:134.4/7/35.07.022/2020  Nomor:001/MOU-ICBC/II/2020  Tanggal:17 Februari 2020-17 Februari 20221		12 bulan  Tanggal:17 Februari 2020-17 Februari 20221		penyusunan pra studi kelayakan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi tenaga listrik berbasis teknologi ramah lingkungan
8	Direktorat pengembangan kesehatan lingkungan permukiman direktorat jendral cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Nomor:119/8/35.07.022/2020  Tanggal:30 Januari 2020	sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tentang pembangunan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik di kabupaten malang			
9	BNI	Nomor:900/9/35.07.022/2020  Nomor:UBM/5.1/001/PKS/2020  tanggal:18 Maret 2020-18 Maret 2023	perjanjian kerja sama tentang penyediaan layann perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah	3 tahun  tanggal:18 Maret 2020-18 Maret 2023		meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah melalui keuangan daerah dengan memanfaatkan layanan perbankan

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
10	PT Bank pembangunan Daerah Jawa Timur	Nomor:119/10/35.07.022/2020  Nomor:059/070A/KPJ/PN/PKS  Tanggal:20 Mei 2020-20 Mei 2023	Perjanjian kerja sama tentang penatausahaan dan pengeluaran dana Pemerintah Kabupaten Malang	3 tahun  Tanggal:20 Mei 2020-20 Mei 2023		keamanan penyimpanan seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah milik PIHAK KE SATU
11	Universitas Negeri Malang	Nomor: 074/11/35.07.022/2020 Nomor:16.4.27/UN32/KS/2020  Tanggal :17 April 2020 - 17 April 2021	Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama pembangunan Daerah	12 bulan Tanggal :17 April 2020 - 17 April 2021		untuk mensinergikan potensi para pihak di Wilayah Kabupaten Malang
12	Universitas Ma Chung	Nomor:074/12/35.07.022/2020 Nomor: 005/MACHUNG/MOU/III/2020  Tanggal :22 April 2020 - 22 April 2021	Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama pembangunan Daerah	12 bulan Tanggal :22 April 2020 - 22 April 2021		Mensinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Malang
13	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Nomor:074/13/35.07.022/2020  Nomor:1344/Un.3/OT.01.6/03/2020  Tanggal : 02 April 2020 -02 April 2021	Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama pembangunan Daerah	12 bulan  Tanggal : 02 April 2020 - 02 April 2021		Mensinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Malang
14	Badan Penyelenggara BPJS dengan Dinkes Kabupaten Malang	Nomor:367/KTR/VII-05/0520  Nomor:415.4/14/35.07.022/2020  Tanggal: 08 Mei 2020	perjanjian kerja sama tentang penyerahan data dan informasi terkait aksi tanggap pandemi covid-19 dalam layanan lingkup tugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	berlaku selama pandemi covid		untuk pemanfaatan data dan informasi sesuai fungsi dan para pihak terkait aksi tanggap pandemi covid-19 dalam layanan lingkup tugas Badan

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
15	KUD MINA JAYA desa Tambakrejo Kec.Sumbermanjingwetan Kab.Malang dengan Dinas Perikanan	Nomor: 523/15/35.07.022/2020  Nomor:8/KMJ/SB/I/2020  Tanggal : 31 Januari 2020- 31 Januari 2023	Perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI)pondokdadap sendangbiru desa tambakrejo kecamatan sumbermanjingwetan Kabupaten Malang	3 tahun  Tanggal : 31 Januari 2020- 31 Januari 2023		untuk memberikan pelayanan pelelangan ikan dan melaksanakan pemungutan retribusi di TPI
16	Badan Penyelenggara BPJS dengan Dinkes Kabupaten Malang	Nomor:366/KTR/VII-05/0520  Nomor:415.4/16/35.07.022/2020  Tanggal:08 Mei 2020 -08 Mei 2021	Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan data dan informasi dalam layann lingkupntugas bBPJS	12 bulan		Pemanfaatan data dan informasi terkait aksi tanggap pandemi covid dalam layann lingkup tugas BPJS
17	BPJS Kesehatan Cabang Malang	Nomor:415.4/17/35.07.022/2020 Nomor: /KTR/ VII-05 /2020  tanggal:22 Maret 2020	Addendum III tentang kesepertaan program jaminankesehatan nasional bagi penduduk yg di daftarkan oleh pemerintah kab.malang			
18	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Nomor :119/18/35.07.022/2020  Nomor :W 13-A35/4120/HM.01.1/7/2020  Tanggal 10 juli 2020-10 Juli 2023	Nota Kesepakatan tentang program pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Malang	3 tahun  Tanggal 10 juli 2020-10 Juli 2023		mempercepat kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat
19	PT POS PERSERO	Nomor : 415.4/19/35.07.022/2020  Nomor : 1208/jaryankug/pdkp/3/0720 Tanggal :30 Juni 2020-30 Juni 2021	Kesepakatan bersama tentang peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Malang	12 bulan Tanggal :30 Juni 2020-30 Juni 2021		mewujudkan efisiensi,efektifitas serta sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Malang

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
20	Kepala BTNBS Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Kehutanan dengan dinas pekerjaan umum Bina Marga Kab.Malang	Nomor : PKS.21/T.8/TU/TU.2/KDN/07/2020  Nomor :119/20/35.07.022/2020 Tanggal :15 Juli 2020 - 15 Juli 2030	Perjanjian kerja sama tentang pembangunan strategis yang tidak dapat di elakkan berupa pemanfaatan dan pengembangan jalan di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kab.Malang Prov.Jatim	5 tahun  Tanggal :15 Juli 2020 - 15 Juli 2030		untuk optimalisasi pengelolaan kawasan TNBTS melalui pemanfaatan dan pengembangan jalan di wilayah kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Coban Trisula,Seksi PTN Wilayah II, Bidang PTN Wilayah I,Balai Besar TNBTS
21	Fakultas Pertanian UNIVERSITAS NEGERI MALANG dengan Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang	Nomor:351/H11/U.03/D/C.06/VI/2020  Nomor:074/21/35.07.022/2020 Tanggal: 30 Juni 2020-30 Juni 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan balai penyuluhan pertanian sebagai laboratorium lapang untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	5 tahun  Tanggal: 30 Juni 2020-30 Juni 2025		upaya apengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan kompetensi SDA sektor tanaman pangan,hortikultura,dan perkebunan
22	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dengan FAKULTAS PERTANIAN ISLAM MALANG	Nomor:074/22/35.07.022/2020  Nomor:357/H11/U.03/D/C.06/III/2020 Tanggal:30 Juni 2020-31 Desember 2022	Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Produksi padi dengan penerapan teknologi sistem intensifikasi potensi lokal pada alahan sub optimal di Kabupaten Malang	2,5 tahun  Tanggal:30 Juni 2020-31 Desember 2022		menumbuhkembangkan potensi sumberdaya lokal bidang pertanian yang dapat menunjang visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
23	DISPENDUK CAPIL dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Nomor:W13-A35/4499/HK.05/6/2020  Nomor:134.4/23/35.07.022/2020 tanggal:24 juli 2020-24 juli 2023	perjanjian kjerjasam tentang pelayanan perubahan status perkawinan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik di pengadilan agama kabupaten malang	3 tahun  tanggal:24 juli 2020-24 juli 2023		mewujudkan tata tertib administrasi kependudukan dalam hal identitas kependudukan bagi masyarakat do kabupaten malang



No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
24	Badan Pendapatan Daerah dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO)	Nomor : 900/24/35.07.022/2020  Nomor : 261/Jaryankug/PR/6/0320  Tanggal : 22 Juli 2020 - 22 Juli 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara online	3 tahun  Tanggal : 22 Juli 2020 - 22 Juli 2023		Memeberikan pelayanan dan kemudahan pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan
25	Pemerintah Kabupaten Malng denagn BPJS KESEHATAN Cabang Malang	nomor:415.4/25/35.07.022/2020  nomor:378/KTR/VII-05/2020 tanggal:11 Juni 2020	ADENDUM IV tentang kepesertaan program jaminankesehatan nasional bagi penduduk yg di daftarkan oleh pemerintah kab.malang			
26	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk kantor cabang Malang	Nomor : 900/26/35.07.022/2020  Nomor : 61/MLG.II/MOU/BCSU/VIII/2020  Tanggal : 12 Agustus 2020 - 12 Agustus 2025	Kesepakatan Bersama tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan	5 tahun  Tanggal : 12 Agustus 2020 - 12 Agustus 2025		Untuk mengadakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi para pihak sehingga bermanfaat bagi masing masing pihak.
27	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA CIPTA HUSADA MALANG	Nomor : 074/27/35.07.022/2020  Nomor : 86/S.WCH/800.03/V/2020  Tanggal : 18 Agustus 2020 - 18 Agustus 2025	Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Daerah	5 tahun  Tanggal : 18 Agustus 2020 - 18 Agustus 2025		Mensinergikan potensi para pihak di Kabupaten Malang
28	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG	Nomor : 074/28/35.07.022/2020  Nomor : HK.03.01/2.8/3020/2020  Tanggal:7 Juli 2020-7 Juli 2021	Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Daerah	12 bulan  Tanggal:7 Juli 2020-7 Juli 2021		Mensinergikan potensi para pihak di Kabupaten Malang

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
29	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Nomor:180/22/426.31/2020  Nomor:134.4/29/35.07.022/2020  Tanggal :14 Agustus 2020-14 Agustus 2025	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	5 tahun  Tanggal :14 Agustus 2020-14 Agustus 2025		Membangun sinergitas,efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah
30	Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dan Pemerintah Kota Pasuruan Dan Pemerintah Kota Malang	Nomor:134.4/30/35.07.022/2020  Nomor:134.4/17/424.011/2020  Nomor:130.1/59/423.013/2020 Nomor:415.4/39/35.73.111/2020  Tanggal:24 Agustus 2020-24 Agustus 2022	Kesepakatan Bersama tentang kerja sama pelaksanaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil dengan metode CAT Badan Kepegawaian Negara	2 tahun  Tanggal:24 Agustus 2020-24 Agustus 2022		untuk menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil PARA PIHAK
31	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum Islam Madinah Kasembon	Nomor:415.4/31/35.07.022/2020 Nomor:7/MOU/RSUJIM/VI/2020  Tanggal:27 Agustus 2020-27 Agustus 2023	Kesepakatan Bersama Tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Malang	3 tahun Tanggal:27 Agustus 2020-27 Agustus 2023		Mewujutkan efisiensi,efektifitas serta sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Malang
32	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum PINDAD	Nomor:415.4/32/35.07.022/2020 Nomor:Sjan/1/RSUP/VIII/2020  Tanggal:28 Agustus 2020-28 Agustus 2023	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Malang	3 tahun Tanggal:28 Agustus 2020-28 Agustus 2023		Mewujutkan efisiensi,efektifitas serta sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Malang
33	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum BEN MARI	Nomor:415.4/33/35.07.022/2020 Nomor:250/RSEB/E/VIII/2020  Tanggal:27 Agustus 2020-27 Agustus 2023	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Malang	3 tahun Tanggal:27 Agustus 2020-27 Agustus 2023		Mewujutkan efisiensi,efektifitas serta sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Malang

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
34	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum MITRA DELIMA	Nomor:415.4/34/35.07.022/2020 Nomor:0185/PKS-RSMD/2708/2020  Tanggal:27 Agustus 2020-27 Agustus 2023	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Malang	3 tahun Tanggal:27 Agustus 2020-27 Agustus 2023		Mewujudkan efisiensi,efektivitas serta sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Malang
35	Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dan Pemerintah Kota Pasuruan Dan Pemerintah Kota Malang	Nomor:134.4/35/35.07.022/2020  Nomor:134.4/1062/424.103/2020 Nomor:130.1/69/423.013/2020 Nomor:415.4/43/35.73.111/2020  Tanggal: 22 September 2020	Perjanjian Kerja sama tentang kerja sama pelaksanaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil dengan metode CAT Badan Kepegawaian Negara			Mengjamin akuntabilitas pelaksanaan CPNS formasi Tahun 2019 Pemerintah Daerah para pihak pada tahapan SKB dengan metode CAT BKN
36	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen	Nomor : 074/36/35.07.022/2020  Nomor : 0706.1/LBG/STIKes-KPJ/X/2020  Tanggal : 12 Oktober 2020 - 12 Oktober 2021	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	1 tahun Tanggal 12 Oktober 2020 - 12 Oktober 2021	Pemerintah kabupaten Malang	Mensinergikan potensi para pihak di wilayah Kabupaten Malang
37	Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Malang	Nomor : 184.4/37/35.07.022/2020  Nomor : 181/020/011/2020  Tanggal : 07 Juli 2020-07 Juli 2025	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan antar Daerah	5 tahun Tanggal 07 Juli 2020 - 07 Juli 2025	Pemerintah kabupaten Malang	Mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah untuk menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan publik
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum Mitra Delima	Nomor : 415.4/38/35.07.022/2020  Nomor : 0193/PKS-RSMD/3009/2020  Tanggal : 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pelaporan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga secara Daring	3 tahun Tanggal 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan kemudahan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan kepada Masyarakat Kabupaten Malang
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum Pindad	Nomor : 415.4/39/35.07.022/2020  Nomor : SJAN/1a/RSU-P/VIII/2020  Tanggal : 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pelaporan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga secara Daring	3 tahun Tanggal 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan kemudahan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan kepada Masyarakat Kabupaten Malang

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum BEN MARI	Nomor : 415.4/40/35.07.022/2020  Nomor : 250/RSBM/E/III/2020  Tanggal : 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pelaporan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga secara Daring	3 tahun Tanggal 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan kemudahan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan kepada Masyarakat Kabupaten Malang
41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit Umum Islam Madinah	Nomor : 415.4/41/35.07.022/2020  Nomor : 7/MOU/RSUM/VII/2020  Tanggal : 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pelaporan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga secara Daring	3 tahun Tanggal 27 Agustus 2020 - 27 Agustus 2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan kemudahan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan kepada Masyarakat Kabupaten Malang
42	Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Malang	Nomor : 900/42/35.07.022/2020  Nomor : 71/PKS/MLG.II/BCSU/IX/2020  Tanggal : 07 September 2020 - 07 September 2021	Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Dana dalam Bentuk Deposito	12 bulan Tanggal 07 September 2020 - 07 September 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan monitoring keuangan daerah melalui layanan perbankan khususnya penempatan dana dalam bentuk deposito pada PIHAK KEDUA
43	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ISKAK TULUNGAGUNG	Nomor : 134.4/43/35.07.022/2020  Nomor : 445/74/407.206/2020  Tanggal : 7 Juli 2020 - 6 Juli 2021	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan SWAB TEST/PCR (Polymerase Chain Reaction)	1 tahun Tanggal 7 Juli 2020 - 6 Juli 2021	Dinas Kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada PARA PIHAK secara komprehensif
44	Pemerintah Kabupaten Malang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	Nomor : 119/44/35.07.022/2020  Nomor : 2468/Kk.13.35.6/PW 01/09/2020  Tanggal : 14 September 2020-14 September 2023	Nota Kesepakatan tentang pelayanan perubahan status perkawinan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Malang	3 tahun Tanggal 14 September 2020 - 14 September 2023	Pemerintah kabupaten Malang	Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Malang yang berkaitan dengan pelayanan perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), menciptakan mekanisme kerja sama yang transparan dan akuntabel, dan meningkatkan peran aktif PIHAK KESATU sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas
45	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Merdeka Malang	Nomor : 074/45/35.07.022/2020  Nomor : KS-15.1/UM/IX/2020  Tanggal : 17 September 2020 - 17 September 2025	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	5 tahun Tanggal 17 September 2020 - 17 September 2025	Pemerintah kabupaten Malang	Mensinergikan potensi PARA PIHAK

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
46	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institut Agama Islam Al-Qolam Malang	Nomor : 074/46/35.07.022/2020  Nomor:B.01/IAI-Q/152.IX/2020  Tanggal : 8 September 2020 - 8 September 2025	Kesepakatan Bersama antara Kerja Sama Pembangunan Daerah	5 tahun Tanggal 8 September 2020 - 8 September 2025	Pemerintah Kabupaten Malang	Mensinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Malang
47	Universitas Negeri Malang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Nomor : 074/47/35.07.022/2020  Nomor : 22.9.74/UN32.IV/KS/2020  Tanggal : 22 September 2020 - 22 September 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	3 tahun Tanggal 22 September 2020 - 22 September 2023	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya pelayanan kesehatan atas dasar saling membutuhkan dan saling melindungi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian mutu pelayanan yang berstandar professional sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK
48	RSUD Kanjuruhan Kanjuruhan dan Universitas Negeri Malang	Nomor : 074/48/35.07.022/2020  Nomor : 22.9./UN32.IV/KS/2020  Tanggal: 22 September 2020 - 22 September 2023	Perjanjian kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat			
49	DINAS PENDIDIKAN dan INSTITUT AGAMA ISLAM AL QOLAM MALANG	Nomor : 900/49/35.07.022/2020  Nomor : A.01/Pasca.IAI.Q/013/2020	Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualifikasi SDM bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Malang			
50	Universitas Wisnuwardhana Malang dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang	Nomor : 074/50/35.07.022/2020  Nomor : 354/071028/RTR/MOU/IX/2020  Tanggal : 26 September 2020 - 26 September 2021	Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Sinergitas Penta Helix dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka	1 tahun Tanggal 26 September 2020 - 26 September 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menciptakan merdeka belajar dan sinergitas antara Perguruan Tinggi dengan lembaga pendidikan, BUMN, Pemerintah, Asosiasi, dan Kemitraan masyarakat, meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wisnuwardhana Malang, meningkatkan dan mendukung kegiatan kolaborasi sinergitas penta helix dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
51	Pemerintah Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang	Nomor : 119/51/35.07.022/2020  Nomor : 304/PKS-35.07/IX/2020  Tanggal : 25 September 2020 - 25 September 2024	Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan melalui Pola Trijuang di Kabupaten Malang	4 tahun Tanggal 25 September 2020 - 25 September 2024	Kantor Pertanahan	Mendukung program Nawa Bhakti Satya serta percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha Ease of Doing Business (EODB), dan mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Malang

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
52	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang	Nomor : 074/52/35.07.022/2020  Nomor : HK.03.01/2.8/5410/2020  Tanggal : 15 September 2020 - 15 September 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Klinik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	3 tahun  Tanggal 15 September 2020 - 15 September 2023	Dinas Kesehatan	terselenggaranya pelayanan kesehatan atas dasar saling membutuhkan dan saling melindungi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian mutu pelayanan yang berstandar profesional sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK
53	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang	Nomor : 074/53/35.07.022/2020  Nomor : 247/S.WCH/800.03/IX/2020  Tanggal : 15 September 2020 - 15 September 2023	Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Klinik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	3 tahun  Tanggal 15 September 2020 - 15 September 2023	Dinas Kesehatan	terselenggaranya pelayanan kesehatan atas dasar saling membutuhkan dan saling melindungi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian mutu pelayanan yang berstandar profesional sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK
54	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang	Nomor : 415.4/54/35.07.022/2020  Nomor : ..... /KTR/VII-05/0920  Tanggal : 28 September 2020	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Malang	Tanggal 28 September 2020	Dinas Tenaga Kerja	
55	BKD Provinsi JATIM dan BKPSDM Kabupaten Malang	Nomor : 120.23/55/35.07.022/2020  Nomor : 800/11755/204.2/2020  Tanggal : 9 November 2020 - 9 November 2022	Perjanjian Kerja Sama tentang Integritasi Data Kepegawaian ASN Se-Provinsi Jawa Timur	2 tahun  Tanggal 9 November 2020 - 9 November 2022	BKD Prov. JATIM	Mewujudkan ketersediaan data dan informasi/statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten dan berkesinambungan dalam mendukung Satu Data Kepegawaian ASN Se-Provinsi JATIM sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kepegawaian Provinsi Jawa Timur
56	Pemerintah Kabupaten Malang dengan BPJS KESEHATAN Cabang Malang	Nomor : 415.4/56/35.07.022/2020  Nomor : 401/KTR/VII-05/2020  Tanggal : 22 Maret 2020 - 22 Maret 2021	Addendum III tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang	1 tahun  Tanggal 22 Maret 2020 - 22 Maret 2021	Dinas Kesehatan	
57	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Nomor : 074/57/35.07.022/2020  Nomor : 11544/UNIV.F03/KS/2020  Tanggal : 26 Oktober 2020 - 26 Oktober 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama dalam Kegiatan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Malang	5 tahun  Tanggal 26 Oktober 2020 - 26 Oktober 2025	Dinas Tenaga Kerja	Mensinergikan potensi PARA PIHAK
58	Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu	Nomor : 134.4/58/35.07.022/2020  Nomor : 415.4/ /35.73.111/2020 Nomor :  Tanggal : 28 Desember 2020 -	Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Strategi Pengendalian Inflasi Daerah		Sekretariat Daerah	

No	MITRA KERJASAMA	NOMOR KERJASAMA	BIDANG KERJASAMA	JANGKA WAKTU	SKPD	PELAKSANAAN/TUJUAN
59	Pemerintah Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan Cabang Malang	Nomor : 119/59/35.07.022/2020  Nomor: 1069/KTR/VII-05/1220  Tanggal : 22 Desember 2020	Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang di daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang	1 tahun Tanggal 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021	Dinas Kesehatan	Terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk PBPU dan BP Pemerintah Kabupaten Malang yang dikelola oleh BPJS Kesehatan
60	Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang	Nomor : 074/60/35.07.022/2020  Nomor : 089/SK_PKS/RSU-UMM/XII/2020  Tanggal : 27 Oktober 2020	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Swab Test / Polymerase Chain Reaction	Tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Kesehatan	
61	Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang	Nomor : 134.4/61/35.07.022/2020  Nomor : 1103/KTR/VII-05/2020  Tanggal : 28 Desember 2020	Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang di daftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Pemerintah Kabupaten Malang	Tanggal 28 Desember 2020	Dinas Kesehatan	
62	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS dr. Soeproen	Nomor : 074/62/35.07.022/2020  Nomor : BKS/225/XII/2020  Tanggal : 28 Desember 2020	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5 tahun Tanggal 28 Desember 2020 - 28 Desember 2025	Pemerintah Kabupaten Malang	Meningkatkan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Malang
63	Pemerintah Kabupaten Malang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ISKAK TULUNGAGUNG	Nomor : 134.4/63/35.07.022/2020  Nomor : 445/xx/407.206/2020  Tanggal : 14 Agustus 2020 - 6 Juli 2021	Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan SWAB TEST/PCR (Polymerase Chain Reaction)	1 tahun Tanggal 14 Agustus 2020 - 6 Juli 2021	Dinas Kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada PARA PIHAK secara komprehensif